

**KEBIJAKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI
OLAHRAGA DI KOTA PALU
(STUDI KASUS CABANG OLAHRAGA KARATE)**



SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana(S.Sos)
Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu

Oleh

Dinda Nuraisyah
NIM: 20.21.70.001

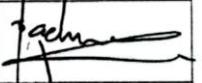
**PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara DINDA NURAI SYAH NIM. 20.2.17.0001 dengan judul "Kebijakan Politik Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kota Palu (Studi Kasus Cabang Olahraga Karate)", yang telah di ujikan di depan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal Kamis 31 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1446 H dipandang bahwa Skripsi ini telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan untuk melanjutkan pada kegiatan pengurusan surat izin penelitian.

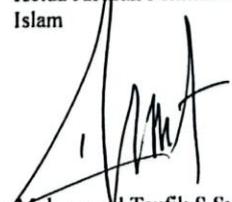
Palu, 01 September 2024 M
27 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos	
Penguji Utama	Dr. Rusdin, M. Fil.i.	
Penguji II	Fachriza Ariyadi, S.I.Kom.M.Si.	
Pembimbing I	Drs.H.Ismail Pangeran.M.Pd.i	
Pembimbing II	Muthia, M.AP	

Mengetahui:

Ketua Jurusan Pemikiran Politik
Islam


Muhammad Taufik, S.Sy., M.Sos.
NIP.198604222019031002

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab
dan Dakwah


Dr. H. Sidiq, M. Ag.
NIP.196406161997031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ **Kebijakan Politik Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kota Palu (Studi Kasus Cabang Olahaga Karate)**” Benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu 1 September 2024



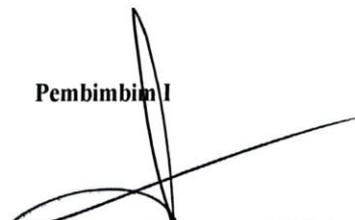
Dinda Nuraisyah
NIM: 20.21.70.001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Politik Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kota Palu (Studi Kasus Cabang Olahraga Karate)” oleh Dinda Nuraisyah, NIM:20.21.70.001, Mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 22 Juli 2024

Pembimbing I



Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.
NIP.196606251997031001

Pembimbing II



Muthia, M.AP.
NIP.199506262020122009

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, karena berkat nikmat dan hidayahnya sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Segala daya dan upaya yang maksimal telah penulis lakukan demi kesempurnaan Proposal skripsi ini, namun sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan Proposal skripsi ini. Oleh karena itu segala masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan dari kesempurnaan Proposal skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada :

1. Kedua orangtua tercita, yaitu Ibunda Helmi dan ayah yudhi yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, memberikan pengorbanan yang tidak terhingga dan memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap Dosen dan pegawai UIN Datokarama Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Studi di UIN Datokarama Palu.
3. Bapak Dr.H.Sidik,M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan beberapa kebijakan khusus dalam penyusunan.
4. Bapak Muhammad Taufik, M. Sos. Selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Bapak Fachriza Ariyadi,S.I.Kom.M.Si. Sekertaris Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Datokarama Palu yang telah mengarahkan dan membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I. Selaku pembimbing I dan Ibu Muthia, M.AP. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat hingga bisa selesai dengan sangat baik.
7. Kepala perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifa'I, S.E.,M.M. serta seluruh Staf yang telah dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

8. Seluruh Staf DPRD Kota Palu, dan Staf KONI Kota Palu serta Atlet-atlet Karate yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan pada skripsi.
9. Teman-teman dilingkungan UIN Datokarama Palu, khususnya Anisa Butudoka dan teman-teman PPI angkatan 2020 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi dan masukkan kepada penulis selama Studi berlangsung.
10. Teman-teman karate yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya serta teman saya, Baso Surialdi yang menjadi penghibur bagi penulis setiap penulis sedang berada dalam keadaan jenuh dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua rekan penulis yang telah bekerja sama dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan mencari kelengkapan bahan dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt, melimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala kebaikan dan bantuan yang diberikan bernilai ibadah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Palu, 31 Juli 2024


Dinda Nuraisyah
NIM:20.21.70.001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penegasan Istilah	6
F. Garis-garis Besar Isi.....	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori.....	11
1. Kebijakan.....	11
a. Faktor-Faktor Kebijakan	12
b. Bentuk Kebijakan	13
c. Tahap-Tahap Kebijakan.....	14
2. Peningkatan Prestasi	15
3. Olahraga dan Ruang Lingkup Olahraganya	17
a. Ruang Lingkup Olahraga	18
b. Kondisi Keolahragaan.....	19
c. Pembangunan Olahraga	20
4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Olahraga	22

C. Kerangka Pemikiran.....	25
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Kehadiran Peneliti	26
D. Data dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	28
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian DPRD Kota Palu	32
1. Sejarah Berdirinya DPRD Kota Palu	32
2. Visi dan Misi DPRD Kota Palu	33
3. Struktur Organisasi DPRD Kota Palu	34
B. Hasil Penelitian KONI Kota Palu	36
1. Sejarah KONI.....	36
2. Visi dan Misi KONI Kota Palu	38
3. Tugas Pokok KONI.....	38
4. Tugas KONI di Provinsi dan Kota/Kabupaten	39
5. Fungsi KONI Kota Palu	40
6. Susunan Personalia Pengurus KONI Kota Palu.....	40
C. Hasil Pembahasan.....	44
1. Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga	44
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kota Palu.....	57
A. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kota Palu.....	57
B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Prestasi olahraga di Kota Palu.....	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 64
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Penelitian terdahulu...9

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran	25
2. Struktur Organisasi DPRD Kota Palu... ..	35
3. Susunan Pengurus KONI Kota Palu.....	41
4. Jumlah Atlet di Kota Palu.....	49
5. Nama-nama Atlet PON di Kota Palu	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin Penelitian menyusun Skripsi.....
2. Surat Desposisi Peneliti.....
3. Pedoman Wawancara.....
4. Pedoman Observasi.....
5. Dokumentasi Penelitian.....
6. Daftar Riwayat Hidup.....

ABSTRAK

Nama Penyusun : DindaNuraisyah
Nim : 202170001
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN POLITIK DALAM
MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI
KOTA PALU (STUDI KASUS CABANG
OLAHRAGA KARATE)**

Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Politik Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kota Palu. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah (1) Bagaimana kebijakan politik Pemerintah Kota Palu terhadap peningkatan prestasi olahraga (cabor karate) di Kota Palu?. (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palu dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga (cabor karate) di Kota Palu?

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dalam deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Setelah penulis melakukan riset, observasi, wawancara, dan penelitian di kantor DPRD Kota Palu dan KONI Kota Palu, penulis mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Palu dan KONI Kota Palu berjalan dengan prinsip kebijakan publik mulai dari faktor kebijakan, bentuk kebijakan dan tahap kebijakan. Walaupun tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, olahraga-olahraga di Kota Palu berjalan dengan semestinya meskipun adanya kekurangan yang tidak dapat dipungkiri dan menyebabkan terhambatnya program dan proses kerja dalam pembangunan. Dalam implementasinya, ditemui beberapa faktor pendukung yakni: faktor pembinaan potensi daerah, penyelenggaraan olahraga, sarana dan prasana yang sedang ditingkatkan, perhatian Pemerintah Kota Palu terhadap olahraga beramgsur membaik. Sedangkan faktor penghambat adalah keterantungan terhadap dana dalam proses penyediaan dan pembangunannya untuk meningkatkan olahraga di Kota Palu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga adalah kegiatan dimana orang berlari, berenang, melompat, dan lain-lain. upaya untuk melindungi kesehatan fisik. Saat ini olahraga terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan teknologi khususnya di dunia. Olahraga tidak hanya menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan jasmani saja, namun ada juga kelas atlet terlahir yang mengikuti kompetisi nasional bahkan internasional untuk menunjukkan siapa yang terbaik. Di banyak bidang olahraga seperti ekonomi, politik, masyarakat dan budaya. Secara umum pembinaan atlet melalui pembinaan olahraga merupakan upaya peningkatan atau perluasan tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas dalam proses menambahkan atlet dan terjaminnya keberlangsungan dan regenerasi. Kualitas yang terkait dengan pembentukan kepribadian disiplin, beretos kerja tinggi, dan ambisi. Dua komponen kuantitas dan kualitas merupakan faktor penentu yang akan menghasilkan kenaikan atlet. Rasulullah SAW bersabda :

رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ
 الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ
 وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَتْ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ
 وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

Artinya : “Orang mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah Swt dari pada orang mukmin yang lemah. Namun begitu, kedua-duanya sama-sama mempunyai kelebihan. Jagalah agar kamu dalam keadaan (situasi) yang bermanfaat bagi dirimu dan mohonlah selalu pertolongan kepada Allah Ta’ala, dan jangan bosan. Jika engkau mendapat cobaan, jangan berkata: “seandainya (tadi) aku perbuat begini dan begitu (tentu tidak akan begini jadinya).” Tetapi ucapkanlah “Allah Maha Kuasa berbuat sekehendak-Nya.” Karena kata-kata “law” (seandainya) memberi peluang bagi syaitan.”¹

Hadis diatas dapat dipahami bahwa orang mukmin yang jasmaninya dan rohaninya kuat akan lebih cinta kepada Allah dari pada orang mukmin yang lemah.

Inti dari berbagai macam unsur olahraga yang berhubungan, sistematis, dan berkelanjutan disebut sistem olahraga. Olahraga tujuan nasional dicapai melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan. Di Indonesia, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memainkan peran utama dalam berbagai operasi teknis sistem keolahragaan nasional. KONI yang merupakan singkatan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang disahkan dan diakui, berwenang dan bertanggung jawab untuk penetapannya, pembinaan, pengembangan, dan koordinasi seluruh implementasi kegiatan olahraga prestasi. Tujuan KONI adalah untuk mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan di tingkat dunia, membangun karakter,

¹ Ma'mur Daud, *terjemah Hadis Shahih Muslim*, (Malaysia: klang book centre, 1995), Cet ke-2, Jilid VIII, hadis 6945, h. 56.

mengangkat harkat dan martabat, dan karakter kehormatan bangsa dalam upaya mempererat, memperkuat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Penyelenggaraan keolahragaan yang diatur peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan keolahragaan adalah setiap tindakan atau kegiatan olahraga, pada setiap tingkatan lingkup kelompok hingga nasional sebagaimana dimaksud dalam pembinaan dan pengembangan olahraga dengan program pengkatagorian olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga bagi penyandang cacat, sarana olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta standarakreditasi, dan sertifikat. Selaku penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional, menteri olahraga memiliki tugas untuk menentukan kebijakan keolahragaan, standar keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan seperti diatur dalam pasal 2 pemerintah nomor tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah diatur dalam pasal 10 pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan yang menyebutkan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.²

Dengan kata lain, negara mempunyai peranan penting dalam menentukan keberadaan dan terselenggaranya olahraga. Peningkatan performa atlet Indonesia diselenggarakan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

²Mahatma Chryshna, “*tentang Peraturan Pemerintah (PP) Penyelenggaraan Keolahragaan No. 16 Tahun 2007*”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/peraturan-pemerintah-tentang-penyelenggaraan-keolahragaan>. (14 September 2023).

Nasional (SKN)³.SKN merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang olahraga. Kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk menggunakan kemampuan sekaligus mengatasi ancaman untuk mencapai tujuan, dan segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah. Artinya kebijakan adalah keputusan mengenai pilihan pemerintah untuk mengatur layanan kesehatan atau tujuan publik, termasuk keputusan untuk mengatur olahraga.

Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah berusaha untuk meningkatkan prestasi atlet dengan menggunakan bentuk pembinaan olahraga di Indonesia sebagai dasar untuk pembinaan berjangka. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan mendirikan berbagai pusat pembinaan olahraga untuk pelajar yang merupakan cikal-bakal atlet berprestasi. Ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang menetapkan bahwa pada setiap dua jalur pendidikan dapat didirikan unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

Kebijakan keolahragaan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet dari setiap cabang olahraga harus dibuat dan didukung untuk meningkatkan kondisi keolahragaan. Pemerintah Daerah Kota Palu memiliki kebijakan olahraga yang mengatur empat bidang: pembinaan olahraga, permasyarakatan olahraga, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dan peningkatan prestasi atlet. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merencanakan berbagai

³ UUD RI, “*tentang Peningkatan prestasi atlet Indonesia diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional*”, <https://jdih.kemendikbud.go.id/fulltext/2005/3tahun2005uupenj.htm>.(16 September 2023).

inisiatif untuk mempersiapkan PON XXI ACEH-SUMUT 2024. Untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan untuk atlet PON Sulawesi Tengah tercapai, program-program tersebut harus segera dilaksanakan.

Dari berbagai program-program yang diterapkan dan ditargetkan, maka peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu sangat dibutuhkan dalam mendukung program-program yang telah disiapkan untuk menghadapi PON XXI ACEH-SUMUT 2024.

Atas dasar pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan mengenai kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Politik Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kota Palu (studi kasus cabang olahraga karate)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan politik Pemerintah Kota Palu terhadap peningkatan prestasi olahraga (cabang olahraga karate) di Kota Palu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah kota Palu dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga (cabang olahraga karate) di Kota Palu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ditetapkan berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan kebijakan politik Kota Palu terhadap peningkatan prestasi olahraga (cabang olahraga karate).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah kota Palu dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga (cabang olahraga karate) di Kota Palu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang di tetapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mampu memberikan sumbang secara Ilmiah bagi Program Studi Pemikiran Politik Islam terutama yang berhubungan dengan Mata Kuliah Kebijakan Politik.
 - b. Peneliti yang akan datang dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian serupa dan dalam bidang yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hal ini dapat memberikan pengalaman berharga bagi peneliti dan menambah pengetahuan peneliti tentang pelatihan dan peningkatan prestasi olahraga di wilayah tersebut.

- b. Ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Palu untuk membuat kebijakan politik yang lebih baik untuk meningkatkan prestasi olahraga di setiap cabang olahraga yang diprioritaskan.

E. Penegasan Istilah

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan adalah tindakan pemerintah dalam mengelola masyarakat dan kehidupan masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan program serta mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁴
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Politik” mencakup pemerintahan nasional dan organisasi buatan manusia lainnya, sedangkan “pemerintahan” adalah otoritas terorganisir yang menekankan kepemimpinan dan membangun nilai-nilai bersama.⁵
3. Dalam Kamus Besar Bahasa, Meningkatkan yaitu memiliki arti mengangkat diri, menaikkan (derajat, tarif dan sebagainya), mempertimbangkan dan juga memperhebat .⁶
4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Olahraga yaitu suatu rangkaian kegiatan keterampilan gerak atau memainkan objek yang tersusun tertentu dalam pelaksanaannya seperti pertandingan, permainan, perlombaan atau campuran dari ketiga-tiganya.⁷
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prestasi adalah hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Prestasi dapat

⁴Dr.Dian suluh Kusuma Dewi,M.AP., “*Kebijakan Publik;Proses, Imlementasi dan Evaluasi*”, (Yogyakarta, 1, Juni 2022), hlm 1

⁵Dr. Sahya Anggara, M.Si. “*Sistem politik Indonesia*”, (Bandung: 2013), hlm 4.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008). hlm 1568.

⁷Dr. hermawan, S.e., M.Pd. “*Olahraga, Rekreasi Dan Waktu Luang*”, (Depok: 2020). hlm 15.

dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan.⁸

F. Garis-Garis Besar Isi

Sistematika penulisan dan pembahasan skripsi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang apa yang dibahas dalam skripsi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan latar belakang masalah, termasuk ide-ide yang mendasari penulisan ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis besar isi yang membahas kebijakan politik untuk meningkatkan prestasi olahraga Kota Palu.

BAB II : Kajian Pustaka

Tentang teori dan beberapa hal pokok di antaranya membahas tentang kebijakan politik apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan prestasi atlet pada cabang olahraga yang ada di Kota Palu.

BAB III : Metode Penelitian

Yang mencakup penjelasan tentang proses pengumpulan dan analisis data untuk memberikan arahan dalam

⁸ KBBI "Arti Kata Prestasi", (<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/prestasi>).

penulisan ini. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang membahas topik-topik seperti jenis penelitian, lokasi penelitaian, kehadiran peneliti, dan sumber data dan teknik pengumpulan dan analisis data. Selain itu, ada juga topik tentang pengujian validitas data. Metode penelitian ini digunakan untuk memberikan data dan informasi yang jelas pada skripsi.

BAB IV : Hasil dan Penelitian

Hasil dan pembahasasn menjelaskan beberapa hal pokok, yakni gambaran umum DPRD Kota Palu dan KONI Kota Palu, bagaimana kebijakan dan faktor pendorong serta faktor penghambat dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berupaya mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu membantu penulis menetapkan penelitian dan menunjukkan validitas penelitian.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Widya Permatasari (2014). ¹	Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Maros.	Metode yang sama digunakan kualitatif dan sama-sama fokus pada peningkatan olahraga.	Hanya terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan.
2.	Pryanka Grymaldi (2022). ²	Pemberdayaan Atlet Karate Untuk Meningkatkan Prestasi Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.	Metode dan lokasi yang sama serta penelitian berfokus pada prestasi cabang olahraga karate.	Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan atlet di Kota Palu.

¹ Widyani Permatasari, "Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Maros", (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin).

² Pryanka Grymaldi, "Pemberdayaan Atlet Karate Untuk Meningkatkan Prestasi Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga", (Asdaf Kota palu: Program studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat).

3	Mambang Fatmah (2016). ³	Strategi KONI dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Di Provinsi Kalimantan.	Penelitian berfokus pada KONI dan prestasi atlet.	Penelitian ini hanya spesifik membahas strategi yang ada pada KONI Provinsi Kalimantan.
4	Harahap (2018). ⁴	Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi atlet Nasional.	Penelitian ini juga berfokus pada kebijakan dalam meningkatkan prestasi olahraga.	Penelitian ini hanya berfokus pada atlet nasional saja.
5	Aldian Jatmoko (2017). ⁵	Peran DISPORA Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).	Meningkatkan Prestasi olahraga atlet.	Penelitian ini hanya berfokus pada DISPORA dan atlet PPLP saja.

Sumber: Data diolah Penulis (2024).

³ Mambang Fatmah, "Strategi KONI dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Di Provinsi Kalimantan", (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah).

⁴ Harahap, "Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi atlet Nasional", (Universitas bakrie: Program studi Ilmu Politik).

⁵ Aldian Jatmoko, "Peran DISPORA Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)", (Universitas Riau: Program studi Ilmu Administrasi Publik).

B. Kajian Teori

1. Kebijakan

Secara umum, istilah kebijakan adalah prinsip atau tindakan yang ditetapkan untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan didefinisikan sebagai undang-undang, baik yang membuatnya maupun yang menaatinya, dimana keputusan publiknya dibuat oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini jelas merupakan proses politik yang kompleks. Ini mencakup tujuan negara, proses pengambilan keputusan, individu atau kelompok yang terlibat, dan bagaimana aparat birokrasi menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶

Dari definisi di atas kita dapat menegaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau pemimpin. Tindakan ini terkait dengan pengambilan keputusan dan melibatkan tujuan politik dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.

Di Indonesia, 'politik' berarti administrasi pemerintahan atau proses pemerintahan dan sebagainya.⁷ Dapat berarti informasi mengenai urusan pemerintahan, seperti: Ini juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan saat ini atau sebelumnya di suatu negara atau negara lain dan tindakan, kebijakan, strateginya, dll. Dalam bahasa Arab kata politik dikenal dengan istilah *siyash* yang berarti ciptaan, upaya-upaya strategis dan pengaturan tentang sesuatu.⁸ Dalam mengartikan kebijakan politik tidak terlepas dari

⁶ Budi Winarno. "*Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*". (Yogyakarta: 2012), hlm 19.

⁷ J.S. Poerdarminta. "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). hlm 763.

⁸ amil Saliba. "*Mu'jam al-falsafi*". (Mesir: Dar al-Fikr, 1978), hlm 45.

kebijakan publik atau *public policy*. Kebijakan politik yang dimaksud di sini adalah politik dalam konteks kajian kebijakan publik.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah pada suatu bidang tertentu, tergantung pada hambatan dan peluang terhadap kebijakan. Kebijakan yang diusulkan bertujuan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.⁹

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu. Bidang tertentu yang dimaksud adalah bidang politik, sehingga kebijakan politik yang dimaksud termasuk keputusan dan peraturan pemerintah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah publik demi kepentingan umum masyarakat.

A. Faktor-Faktor Kebijakan

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum.¹⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan, antara lain:

- 1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
- 2) Adanya pengaruh kebiasaan lama
- 3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- 4) Adanya pengaruh dari kelompok luar
- 5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

⁹ Riant Nugroho, Public Policy “*Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*”. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm 93.

¹⁰ Dr. Suharno, M. Si. “*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*”. Yogyakarta: 2010, hlm 52.

Menjelaskan model kebijakan untuk pembuatan kebijakan. Model yang berdasarkan teori informasi ini memandang kebijakan publik sebagai hasil kebijakan politik pada tingkat sosial, politik, ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, kita dapat menganggap kebijakan publik sebagai produk politik. Konsep sistem politik berarti bahwa berbagai lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat menerjemahkan gagasan, termasuk sumber daya dan tuntutan, menjadi keputusan atau kebijakan yang diterima oleh seluruh masyarakat. Singkatnya, sistem politik bekerja untuk menghasilkan input dan output.

B. Bentuk Kebijakan

Kebijakan publik mempunyai bentuk yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan ketentuan bagi seluruh stakeholder dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kebijakan adalah pedoman dan panduan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika tidak, maka akan ada sanksi yang mengikutinya. Bentuk kebijakan yakni dapat dijalankan sebagai hukum yang mengikat kepada seluruh warga negaranya.¹¹ bentuk kebijakan dikategorikan menjadi tiga, sebagai berikut:

- 1) Bentuk pertama adalah undang-undang adalah bentuk akhir dari kebijakan publik yang dijadikan sebagai pedoman dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum. Dapat berupa peraturan pemerintah dan peraturan daerah (Perda).

¹¹ Riant Nugroho, *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo. (Jakarta: 2011), hlm 77-82.

- 2) Bentuk kedua adalah paternalistik yakni Pemimpin berperilaku seperti bapak dan pegawai berperilaku seperti anak. Yang demikian itu adalah bentuk kebijakan yang melekat dan terjadi di semua level kebijakan. Pemimpin sebagaimana seorang ayah memperlakukan pegawai seperti anak-anaknya, kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah.
- 3) Bentuk ketiga adalah paternalisme rasional bisa juga disebut sebagai kepemimpinan yang otoriter. Seluruh keputusan pemimpin adalah final dan wajib dilaksanakan, jika tidak maka akan mendapatkan sanksi atas penolakan tersebut. Kebijakan publik yang bersifat mikro. Kebijakan yang mengatur pelaksanaan dan implemementasi kebijakan di atasnya.

C. Tahap-Tahap Kebijakan

Kebijakan publik melibatkan banyak proses dan variabel yang harus diuji, yang membuatnya rumit. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang sangat tertarik dengan studi kebijakan publik membaginya ke dalam beberapa tahap. Proses kebijakan tersebut terdiri dari lima tahap¹², yaitu:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Suatu tahap di mana masalah-masalah sebelumnya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, agenda kebijakan dapat dirumuskan.

¹² Budi Winarno. "Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus". CAPS. (Yogyakarta 2012), hlm 35.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap di mana semua pertanyaan terjawab. Berbagai alternatif dicari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan hal tersebut dituangkan dalam rencana kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Keputusan peradilan mencapai kesepakatan setelah mayoritas leegislatif memilih salah satu dari berbagai alternatif kebijakan..

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap di mana kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat bawa. Jika program tidak dilaksanakan, itu hanyalah percakapan. Dari pelaksanaan ini, ada hubungan di mana orang mendukungnya dan orang yang menentangnya.

5) Tahap Penilaian Kebijakan

Tahap di mana suatu kebijakan dibuat adalah untuk menilai apakah sudah tepat untuk mencapai manfaat dan dibandingkan dengan tujuan kebijakan.

2. Peningkatan Prestasi

Kinerja merupakan ukuran penting dari hasil yang dicapai selama masa studi. Suatu prestasi dapat Prestasi dapat didefinisikan sebagai hasil yang dicapai jika berdasarkan istilah atau tata bahasa yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil yang dicapai seseorang dengan melakukan kegiatan disebut keberhasilan. Hasil yang diperoleh merupakan bukti upaya yang telah dilakukan. Pendekatan berbasis kinerja memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi

kinerjanya terhadap standar internal dan eksternal serta bersaing dengan orang lain.¹³

Menurut Van De Bos, *level performance individu* atau kelompok terhadap tugas yang diberikan menentukan prestasi yang dicapai setiap individu. Selain itu, motivasi berprestasi yaitu keinginan untuk mengatasi tantangan dan hambatan berkorelasi erat dengan prestasi yang dicapai setiap orang.¹⁴

Dari pengertian prestasi di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dicapai baik dari segi pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat eksternal maupun internal, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Penggunaan dan penggunaan alat bantu untuk meningkatkan kinerja atletik. Kegiatan ini meliputi pembinaan dan peningkatan kinerja pelajar-atlet dan pelajar berbakat di bidang pendidikan dan pelatihan olahraga; melatih atlet dan meningkatkan prestasinya di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; serta pembinaan dan peningkatan prestasi atlet di tingkat lokal dan nasional. Meningkatkan kinerja tingkat menengah tentu bukan suatu tugas yang sulit, tidak efisien, tidak efisien dan memakan biaya. Selain itu, perlu adanya kegiatan yang bertahap.¹⁵ Salah satu cara untuk meningkatkan prestasi yaitu:

1. Pemasalan Olahraga

Pembinaan olahraga diawali dengan pemasalan dimana ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani serta melibatkan sekelompok umur

¹³ W.S. Winkel.. "*Psikologi Pengajaran*". (Jakarta: Gramedia), hlm. 165.

¹⁴ Iksan Adisaputra. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada PT. Bank Mandiri Tbk.*" Skripsi, Manajemen, Universitas Hasanudin, (Makassar: 2012), hlm 11.

¹⁵ Adi Kuncoro. Juknis SIRS. Kementerian Kesehatan RI. Dirjen Bina Upaya Kesehatan. (Jakarta: 2011), hlm 7.

sebagai sasaran. Maksudnya agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui dan melakukan kegiatan olahraga.

2. Pembibitan

Pembibitan merupakan suatu metode yang mempertemukan atlet-atlet berbakat yang berprestasi di berbagai cabang olahraga dan diperiksa secara sistematis dan spesifik oleh orang tua, guru, dan pelatih olahraga. Tujuan dari taman kanak-kanak ini adalah untuk mendidik atlet-atlet berbakat yang berprestasi di berbagai cabang olahraga dan terus berlatih keras.¹⁶

3. Pembinaan Prestasi

Setelah pemasalan dan pembibitan, pembinaan diperlukan untuk mencapai prestasi yang baik. Pembinaan diarahkan melalui latihan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk mencapai prestasi olahraga yang baik diperlukan jangka waktu yang lama, 8 sampai 10 tahun, dan latihan yang baik. Oleh karena itu, pendidikan harus diberikan pada jenjang pendidikan yang tepat, sesuai dengan jenjang anak, sejak usia dini. Namun, bukan berarti anak ditempatkan pada kelompok tertentu sejak dini.

3. Olahraga dan Ruang Lingkup Olahraganya

Salah satu cara terbaik bagi banyak orang untuk menjaga kesehatan fisik dan mental dengan berolahraga. Olahraga, menurut KBBI, adalah gerak badan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan kesejahteraan tubuh. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahraga adalah segala kegiatan sistematis yang bertujuan

¹⁶ Ibid

untuk mendorong, membina, dan mengembangkan kapasitas fisik, mental, dan sosial seseorang. Secara etimologis, kata olahraga berasal dari kata Jawa Kuno yang terdiri dari tiga kata yaitu olah dan raga. Olah artinya perbuatan atau aktivitas dan body artinya kenyamanan, ketinggian atau tempat.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, olahraga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan gerakan jasmani untuk menyehatkan tubuh dan menunjang perkembangan jasmani, rohani, dan sosial.

a. Ruang Lingkup Olahraga

Olahraga telah berkembang menjadi lebih dari sekadar istilah "olahraga" secara keseluruhan. Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab VI, Pasal 17, dijelaskan bahwa olahraga rekreasi dan olahraga prestasi termasuk dalam ruang lingkup olahraga, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab VI, Pasal 18, menjelaskan bahwa olahraga pendidikan adalah bagian dari olahraga. Olahraga diajarkan baik di sekolah formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler ini dimulai dari usia dini.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab VI, Pasal 20, olahraga prestasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai

¹⁷ Sumaryanto. Aksiologi Olahraga Dalam Perspektif Pengembangan Karakter Bangsa. (Yogyakarta: 2016), hlm 46.

prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui pelaksanaan olahraga prestasi melalui prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut.¹⁸

b. Kondisi Keolahragaan

Kebijakan keolahragaan dapat berdampak baik atau buruk pada olahraga. Kondisi keolahragaan adalah keadaan yang terjadi saat berolahraga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Olahraga juga berperan penting dalam keolahragaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi pengolahraga, ketenangan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah dan otoritas daerah wajib menggunakan anggaran pajak pendapatan atau anggaran pajak daerah untuk membiayai olahraga. Dana olahraga harus bersumber dari APBN dan belanja negara atau anggaran pendapatan daerah.¹⁹

Sehingga olahraga dapat mencapai targetnya, diperlukan sarana dan prasarana yang berstandar. Undang-undang No. 3 Tahun 2005 menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Penghargaan diberikan kepada setiap atlet yang berprestasi, baik dari atlet sendiri maupun organisasi dan lembaga olahraga yang bertanggung jawab untuk

¹⁸ Kementerian Pemuda Dan Olahraga, “Peningkatan prestasi atlet Indonesia diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional”, <https://jdih.kemenpora.go.id/>. (31 Agustus 2023).

¹⁹ Kementerian Pemuda Dan Olahraga, “Peningkatan prestasi atlet Indonesia diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional”, <https://jdih.kemenpora.go.id/>. (31 Agustus 2023).

memajukan olahraga. Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan olahraga.²⁰

c. Pembangunan Olahraga

Melaksanakan pembangunan olahraga sesuai dengan arahan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1997, ada serangkaian kebijaksanaan sesuai dengan program pokok yang meliputi.²¹

1. Pembinaan Olahraga Prestasi

Hal ini bertujuan untuk mendukung upaya pengembangan olahraga dan mencapai hasil yang baik guna meningkatkan citra negara dan membawa kebanggaan bagi negara. Hal ini dicapai dengan membina dan mendorong olahraga sejak masa kanak-kanak, seperti menambahkan pendidikan jasmani dan olahraga ke dalam kurikulum sekolah dan mendirikan sekolah khusus olahraga. Peningkatan pengendalian bakat dan seleksi pemain-pemain tangguh dalam kompetisi multi level dari tingkat desa hingga tingkat nasional, yang melibatkan pertandingan yang menghubungkan komunitas, sekolah, dan universitas. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga, seperti penggunaan peralatan olahraga, pelatihan intensif dan metode pembinaan, memberikan kontribusi terhadap perkembangan olahraga.

2. Pemantauan Bakat dan Pembinaan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan calon atlet berprestasi melalui pembinaan olahraga usia dini bagi anak-anak berusia 7-14 tahun melalui

²⁰ Ibid

²¹ Setiadi, J. dan Nugroho. *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi, Penerbit Prenada Media Grup.(Jakarta: 2010), hlm 34.

perkumpulan olahraga, serta pembinaan pendidikan jasmani dan olahraga baik di dalam maupun di luar sekolah melalui pertandingan cabang olahraga tertentu.

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

Melalui penggunaan dan penggunaan alat bantu, kegiatan ini bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan prestasi atlet. Kegiatan ini meliputi pembinaan dan peningkatan kinerja pelajar-atlet dan pelajar berbakat di bidang pendidikan dan pelatihan olahraga; pembinaan dan peningkatan kesiswaan dan prestasi belajar siswa; Menyelenggarakan dan menyelenggarakan kompetisi olahraga tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Semua itu dilakukan dengan bantuan dan dukungan

kendaraan yang tersedia. Kegiatan ini meliputi pembinaan dan peningkatan kinerja pelajar-atlet dan pelajar berbakat di bidang pendidikan dan pelatihan olahraga; pembinaan dan peningkatan kesiswaan dan prestasi belajar siswa; penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Menggunakan berbagai jenis pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tenaga keolahragaan seperti wasit, manager, dan jurnails olahraga. Untuk meningkatkan nutrisi olahragawan, orang harus diberi pengetahuan tentang gizi, menetapkan standar persyaratan gizi untuk makanan olahragawan di asrama dan pusat pelatihan, memberikan insentif yang wajar kepada atlet dan tenaga olahragawan yang berprestasi, dan mendapatkan pembinaan melalui KONI, termasuk pembinaan administrasi, kerja sama dengan negara lain, dan pusat ilmu olahraga.

4. Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari, melestarikan dan memajukan jenis-jenis olahraga yang berkembang di masyarakat, seperti olahraga tradisional dan olahraga alam dan alam terbuka. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan, pengembangan dan pemeliharaan olahraga tradisional, pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pecinta olahraga lingkungan dan alam terbuka, serta peningkatan prestasi dalam kejuaraan nasional dan internasional.

4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Olahraga

Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan yang efektif dan menguntungkan setiap orang. Pada hakekatnya pemerintah daerah merupakan suatu organisasi rakyat yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakat negara tersebut. Oleh karena itu, segala tindakan dan keputusan harus didasarkan pada kepentingan rakyat. Kebijakan tersebut bisa berupa ucapan dari seorang pimpinan, dukungan, perhatian dan lain sebagainya. Setiap respon atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pimpinan bisa diartikan sebagai kebijakan yang dia tetapkan bahkan meskipun pemerintah tidak melakukan sesuatu terkait sebuah kasus namun hal itu akan tetap menjadi sebuah kebijakan dimana akan sangat mempengaruhi atau memberi dampak terhadap masyarakat. Menurut Lewis A.Gunn kebijakan-kebijakan di kelompokkan kedalam sepuluh macam,²² antara lain:

1. Kebijakan sebagai sebuah label atau merek bagi suatu bidang kegiatan pemerintah.

²² Abdul Wahab . *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. (Jakarta: 2011), hlm 16.

2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang di kehendaki
3. Kebijakan menjadi usulan-usulan khusus.
4. Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah.
5. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal.
6. Kebijakan sebagai program.
7. Kebijakan sebagai keluaran.
8. Kebijakan sebagai hasil akhir.
9. Kebijakan sebagai teori atau model
10. Kebijakan sebagai proses.

Dalam proses pembangunan olahraga, hasil utama yang harus dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme, pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan tersusunnya rancangan undang-undang olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga dari daerah sampai nasional. Selain itu, untuk meningkatkan upaya pembinaan bakat, pembibitan olahraga mulai dari kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga, serta meningkatnya jumlah mutu bibit olahragawan.

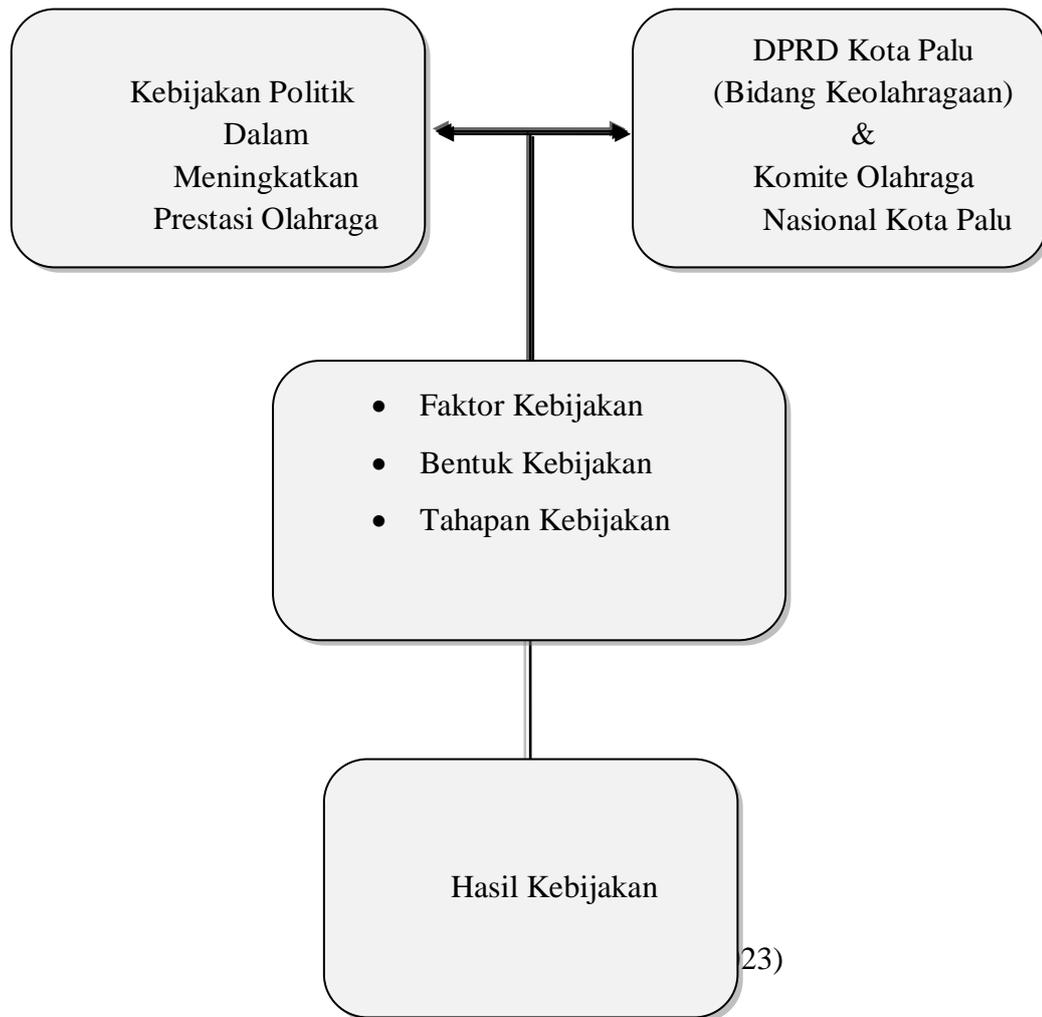
Adanya otonomi daerah menyebabkan suatu daerah dapat membuat aturan tersendiri bagi pengembangan olahraga dalam daerah tersebut. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* artinya sendiri, sedangkan *nomos* berarti hukum atau aturan. Otonomi daerah secara ringkas adalah daerah

yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat atau independen.

Permasalahan dan tantangan program pengembangan pemuda dan olahraga keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengembangan bakat, manajemen olahraga yang tidak efisien, upaya pengembangan yang kurang, kurangnya pengembangan dan metode yang tepat dan sesuai serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga, peralatan dan prasarana olahraga. Kurangnya kompetisi olahraga di tingkat daerah, rendahnya tingkat pendidikan generasi muda dan kurangnya tempat berkumpulnya generasi muda untuk mengekspresi diri.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu. Dalam menganalisa peran politik dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu.

Penelitian kualitatif, menurut Sugiono, adalah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang alami. Peneliti adalah alat utama dalam penelitian ini, dan metode pengumpulan data digunakan secara gabungan, dengan proses analisis data induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya daripada generalisasi.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini hanya dilakukan pada DPRD Kota Palu (Bidang Keolahragaan) dan Komite Olahraga Nasional (KONI). Kota Palu beserta para atlet Kota Palu beserta perangkat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu.

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian yang bersifat kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrumen utama penelitian karena peneliti melakukan interaksi penuh dalam proses pengumpulan data, mulai dari wawancara terhadap beberapa informan narasumber yang bersangkutan dalam penelitian. Pada proses pengumpulan data

¹ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 13.

di lapangan, peneliti juga mendapatkan surat keputusan langsung dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, guna sebagai tanda pengenal untuk peneliti agar proses pengumpulan data tidak dianggap ilegal atau bahkan dianggap sebagai pemicu kontroversi dalam masyarakat.

D. Data Dan Sumber Data

Keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer berasal dari observasi kejadian dan wawancara dengan pegawai negeri sipil dari DPRD Kota Palu, KONI Kota Palu dan Atlet Karate Kota Palu.

2. Data Sekunder

Tahap kedua penelitian ini memuat pedoman kebijakan pemerintah mengenai penelitian, data yang dianggap berguna dalam evaluasi analisis dan integrasi data primer, skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian yaitu:

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, seperti nama-nama atlit karate Kota Palu.²

2. Wawancara

Dalam penelitian, wawancara adalah sesi tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih dihadapkan pada informasi atau penjelasan yang diberikan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

- . Ketua Umum Komisi A, DPRD Kota Palu	: 1 orang
- . Sekertaris Umum KONI Kota Palu	: 1 orang
- . Pendamping Atlet PON Aceh-Sumut 2024	: 1 orang
- . Atlet PON 2024	: 2 orang
<hr/>	
Jumlah	: 5 orang

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa dan sumber informasi yang dapat digunakan untuk mendukung metode observasi dan investigasi dalam penelitian kualitatif.³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi seperti rekaman video atau audio. Dalam analisis

² Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm 70.

³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (cet.6: Bandung: CVALFABET, 2009). Hlm 240.

data, kesimpulan dibuat untuk membuat data mudah dipahami oleh individu dan orang lain.⁴

Dalam domain analisis kualitatif, teknik analisis data dilakukan dalam empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang setiap langkah, langkah-langkah ini akan dibahas secara menyeluruh di bawah ini. Langkah-langkah berikut diambil :

1. Reduksi Data

Tahap terakhir dalam teknik analisis data kualitatif dikenal sebagai reduksi data. Tahap ini melibatkan penyederhanaan dan penghapusan elemen yang tidak diperlukan dari data sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan. Analisis tahap reduksi diperlukan karena jumlah data yang besar dan kompleks. Tahap ini dilakukan untuk menentukan apakah data relevan untuk tujuan akhir.⁵

2. Display Data

Display data, juga dikenal sebagai penampilan data, adalah bagian dari teknik analisis data kualitatif. Ketika sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan, ini disebut penyajian data. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk catatan

⁴Dolab, *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, akses tanggal 09 September 2023, pukul 00:57 WIT.

⁵Dolab, *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*, <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, akses tanggal 09 September 2023, pukul 01:18 WIT.

lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Setelah didistribusikan, data akan terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami.⁶

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data, juga dikenal sebagai penampilan data, adalah bagian dari teknik analisis data kualitatif. Ketika sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan, ini disebut penyajian data. Peneliti mengumpulkan data kualitatif yang selanjutnya diuraikan menggunakan data prespektif. Analisis data menggunakan konstruksi berfikir deduktif yang mengarahkan gambaran umum tentang kebijakan politik pada bab awal, kemudian pada bab akhir akan di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Validasi data diperlukan untuk mengetahui keabsahan dan keakuratan data yang disajikan dalam penelitian kualitatif. Untuk mengetahui keabsahan dan keakuratan data yang disajikan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sesuatu di luar data tersebut sebagai pembanding terhadap data yang ditemukannya. Dalam hal ini, penulis mengevaluasi kembali data yang dikumpulkan melalui analisis keseluruhan terhadap data yang terjadi di wilayah penelitian.⁷

⁶ Ibid

⁷Humas.fku, “tentang observasi atau observasi partisipasi dalam penelitian”, <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian/>. (14 Februari 2023).

1. Kredibilitas atau Validasi internal

Seberapa jauh kesimpulan peneliti mencerminkan keadaan sebenarnya Orang yang mengumpulkan dan menganalisis data dapat dipercaya karena teknik trigulasi, mengecek, diskusi, dan kredibilitas mereka.

2. Reabilitas / konsistensi

Data yang dikumpulkan dapat diandalkan secara teknis dan konsistensi atau keandalannya dapat ditingkatkan dengan menjelaskan secara rinci metode penelitian dan bagaimana hasil dicapai secara statistik.

3. Validitas Eksternal

Keabsahan eksternal merupakan konsep seberapa jauh temuan studi dapat ditransfer ke situasi yang lain.

4. Keterampilan Penelitian

Keterampilan peneliti, metodologi yang benar, dan apresiasi nyata terhadap penelitian kualitatif merupakan tiga faktor penting yang menjamin keterampilan untuk penelitian kualitatif. Peneliti dapat bergantung pada standar dan pedoman untuk menerapkan etika penelitian multikasus, tetapi praktiknya sangat bergantung pada peneliti sendiri

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran DPRD Kota Palu

1. Sejarah Berdirinya DPRD Kota Palu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu adalah lembaga legislatif yang berkedudukan di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan mitra Pemerintah Kota Palu. Berdirinya DPRD Kota Palu pada tahun 1995 tak lepas dari sejarah pembentukan Kota Sulawesi Tengah yang dulunya adalah bagian dari Daerah Swatantra Tingkat II Donggala, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 1952.

Pemerintah pusat secara bertahap memperbaiki struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 menciptakan Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu.³⁸Pada tanggal 11 Juli 1995 Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Abdul Azis Lamadjido melantik Inf Sampe Pamelay sebagai anggota DPRD Palu pertama, didampingi dua wakil yaitu Drs. Pasaulolo Malindu dan Nasrun Hi Nawir untuk melengkapi unsur pemerintah. Bapak Inf Sampe Pamelay menjabat sebagai ketua DPRD Kota Palu Periode 1995-1997 dan digantikan oleh ketua DPRD Kota Palu hingga saat ini antara lain:

1. Inf Hi Ahmad Madjid, Ketua DPRD Kota Palu tingkat II Palu, Periode 1997-1999.

³⁸BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, "*Sejarah Kota Palu*", <https://bpmpsulteng.kemdikbud.go.id/sejarah-kota-palu/>. (18 Juni 2024).

2. Rusdy Mastura, Ketua DPRD Kota Palu, Periode 1999-2004.
3. Andi Malhanan Tombolotutu SH, Ketua DPRD Kota Palu, Periode 2004-2008.
4. H.M Sidik Ponulele S. sos, Ketua DPRD Kota Palu, Periode 2008-2009. H.M Sidik terpilih kembali menjadi ketua DPRD Kota Palu untuk Periode 2009-2014.
5. Mohamad Iqbal Andi Mangga SH, Ketua DPRD Kota Palu, Periode 2014-2017.
6. Drs. H Ishak Cae, M.Si, Ketua DPRD Kota Palu, Periode 2017-2019.
7. Moh Ikhsan Kalbi, Ketua DPRD Kota Palu, Periode 2019-2022.
8. Armin ST, Ketua DPRD Kota Palu, Periode 2022-2023.

2. Visi dan Misi DPRD Kota Palu

Berikut akan dijelaskan visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

A. Visi Dewan Perwakilan Rakyat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu mempunyai visi sebagai berikut :
“Menjadikan Institusi DPRD Kota Palu Sebagai Wadah Aspirasi Lembaga Parlemen Daerah yang Kompetitif, Berwibawa, dan Profesional dengan Memajukan Kota Palu Bersama Pemerintah daerah Sebagai Mitra Seajar”.

B. Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu mempunyai misi sebagai berikut :³⁹

1. Menguatkan peran serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu sebagai lembaga pemerintah daerah dengan peningkatan sumber daya manusia yang humanis, agamais serta berwawasan ekologis.
2. Mendorong peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat melalui forum-forum rapat guna menciptakan suasana kelembagaan yang berdaya saing kuat dalam menjalani jabatan.
3. Mengupayakan percepatan pembangunan dengan mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu serta menciptakan basis masyarakat yang harmonis, selaras serasi dan seimbang dengan perkembangan perkotaan.
4. Menciptakan kota yang nyaman, aman, tentram serta berupaya memperbanyak lapangan pekerjaan bersama Pemerintah Daerah Kota Palu untuk mengantisipasi perkembangan Kota Palu.

3. Struktur Organisasi DPRD Kota Palu

Suatu instansi pemerintah memerlukan struktur manajemen yang memisahkan garis kewenangan, memudahkan pengendalian, perintah kerja, dan tanggung jawab, serta menunjukkan urutan atau hubungan antar setiap unsur untuk mencapai tujuan. Pengendalian yang seragam terhadap seluruh kegiatan pemerintahan diperlukan untuk mencapai tujuan bersama pemerintahan. Peraturan tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan pokok pemerintah. Di lembaga publik, tugas tersebut diatur dalam bentuk komisi.

³⁹ DPRD Kota Palu, "Visi an Misi DPRD Kota Palu". (18 Juni 2024).

Struktur dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dapat dilihat pada gambar berikut :

B. Gambaran KONI

1. Sejarah Komite Olahraga Nasional Indonesia

Saat kekuasaan Jepang runtuh pada Agustus 1945, kongres olahraga pertama kemerdekaan diadakan di Habiprojo, Solo. Kongres tersebut hanya dapat dihadiri oleh tokoh-tokoh olahraga dari pulau Jawa karena situasi darurat (seperti G30S PKI yang kemudian terjadi), dan akhirnya berhasil membentuk badan olahraga yang disebut Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI). Pada awal kongres, ada dua nama yang diusulkan untuk membentuk Badan Olahraga: ISI (Ikatan Sport Indonesia) atau GELORA (Gerakan Latihan Olahraga). Namun, kedua nama tersebut akhirnya tidak dipilih. Dengan pengakuan pemerintah RI, organisasi PORI sekarang merupakan satu-satunya badan resmi persatuan olahraga di Indonesia yang mengatur semua kegiatan olahraga di seluruh negeri, menggantikan peran fungsional Presiden Republik Indonesia telah memilih Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), yang berbasis di Yogyakarta dan dipimpin oleh Sultan Hemangkubuwono IX.

Cikal bakal KONI adalah Ikatan Sport Indonesia (ISI) yang dibentuk oleh beberapa organisasi olahraga yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Perserikatan Lawn Tennis Indonesia (PELTI), dan Perserikatan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi). Pada 31 Desember 1966 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dibentuk. KONI adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan olahraga prestasi di Indonesia.⁴¹ KONI memiliki strategi dan

⁴¹ Komite Olahraga Nasional Indonesia, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/KomiteOlahragaNasionalIndonesia>. (20 Juni 2024).

program khusus untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia pelatih, manajer, atlet, dan karyawan serta untuk mengoptimalkan kinerja pelatih, manajer, dan atlet.

Antara tahun 1978 dan 2004, tidak ada perubahan signifikan dalam konstelasi kelembagaan KONI. Tidak ada perubahan yang didokumentasikan di laman web KONI. Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, yang mengatur Sistem Keolahragaan Nasional, menetapkan "Induk organisasi cabang olahraga nasional yang bersifat mandiri." Komite Olahraga Nasional (KONI) membantu pemerintah membuat kebijakan olahraga nasional dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. Setelah reorganisasi, KONI dan KOI bergabung menjadi Komite Olahraga Nasional (KON) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dengan pengurus yang sama tetapi dengan fungsi yang berbeda. KONI bertanggung jawab atas pembinaan olahraga di dalam negeri dan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, sementara KOI bertanggung jawab atas pengembangan olahraga.⁴²

Untuk menjaga semangat perjuangan dan prestasi yang telah diraih sebelumnya, langkah ini diambil untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan olahraga nasional. KONI terus memainkan peran penting dalam pembangunan olahraga di Indonesia. Melalui dukungan dan pengelolaan yang efektif, organisasi ini terus mendorong atlet-atlet Indonesia untuk mencapai prestasi internasional dan membawa kehormatan bagi negara. KONI, sebagai bagian dari sejarah bangsa, terus menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat

⁴² Ibid

Indonesia karena telah membuktikan bahwa olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang memperkuat persatuan dan jati diri bangsa.

2. Visi dan Misi KONI Kota Palu

Berikut akan dijelaskan visi dan misi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Palu.⁴³

A. Visi KONI Kota Palu mempunyai visi sebagai berikut : “ KONI mempunyai tujuan mewujudkan prestasi olahraga yang membanggakan, membangun watak, mengangkat harkat dan martabat dan kehormatan dalam rangka ikut serta memererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkokoh ketahanan nasional.

B. Misi KONI Kota Palu mempunyai misi sebagai berikut :

1. KONI menjadi induk organisasi yang profesional, modern dan mandiri.
2. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.
3. Turut serta mengembangkan sport science,, sport indusry dan sport tourism.

3. Tugas Pokok KONI

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tetang sistem keolahragaan nasional, tugas KONI adalah:

1. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional

⁴³KONI Kota Palu, "Visi dan Misi".(19 Juni 2024).

2. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota
3. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat nasional
4. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan
5. Menyebarluaskan semangat gerakan olimpiade.

4. Tugas KONI di Provinsi dan Kota/Kabupaten

Komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga nasional, dan komite olahraga nasional kota/kabupaten sendiri adalah entitas independen dengan pengurus yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi, kota, atau kabupaten yang memiliki Komite Olahraga Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, memiliki tanggung jawab sebagai berikut.⁴⁴

1. Melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga di tingkat kota/kabupaten dalam rangka pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga.
2. Membantu Pemerintah Daerah kota/kabupaten dalam penyelenggaraan pekan olahraga.
3. Membantu organisasi cabang olahraga dalam pengembangan dan penggalian bibit olahragawan di kota/kabupaten.
4. Membantu organisasi cabang olahraga di kota/kabupaten dalam permasalahan cabang olahraga.

⁴⁴BPK RI, “tentang Keolahragaan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2022”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>. (20 Juni 2024).

Komite Olahraga Nasional di Provinsi atau Kota/kabupaten mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi atau kota/kabupaten dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
2. Mengkoordinasi induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional di provinsi atau kota/kabupaten.
3. Menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

5. Fungsi KONI

Fungsi KONI adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional.
2. Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga optimal.⁴⁵

6. Susunan Personalia Pengurus KONI Kota Palu

Berdasarkan kedudukan dan fungsi KONI Kota Palu serta penjabaran tugas pokok, fungsi, uraian dan jabatan struktural dan tata kerja KONI Kota Palu sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ KONI Kota Palu, "Dokumen". (19 Juni 2024).

Gambar. 3
Susunan Pengurus KONI Kota Palu



**PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS KONI KOTA PALU
MASA BAKTI 2021-2025**

- I. DEWAN PENYANTUN** :
1. Walikota Palu
 2. Wakil Walikota Palu
 3. Ketua DPRD Kota Palu
 4. DANDIM 1306 Donggala
 5. KAPOLRES Palu
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Palu
 7. Ketua Pengadilan Negeri Palu
 8. Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. DEWAN KEHORMATAN** :
1. Drs. H. Aminuddin Atjo, M.Si.
 2. H.Asri Sawaya, SH.
 3. Wijaya Chandra
- III. PENGURUS**
- Ketua Umum** : **Ruddy Chandra**
Ketua Harian : Reynold Kasrudin, S.Sos.
Sekretaris Umum : Ir. Calvin Tawil
Wakil Sekretaris Umum : Ridwan H. Basatu
Bendahara Umum : Yuliana Alkaf, S.Kom.
Wakil Bendahara : Abdul Havid, S.Sos.,M.Ap.
- IV. BIDANG-BIDANG**
- 1. Bidang Organisasi**
- Ketua** : Jamaludin L, SE.
Anggota : Makasau H. Muda, S.Sos.
: Andrew Afando Maliki, S. Ap.
: Nur Afni, S.Pd.



Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

2. Bidang Pembinaan Prestasi

Ketua : Ninong, S.Pd.,M.Pd.
Anggota : Sophan Lamadjido
: H. Mahyudin Piu
: Juniar Tanase
: Nur Fitri Anisa

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Zainuddin, S.sos.,M.Si.
Anggota : Hj. Nuryanti Turungku, S.Sos.
: Stella Hesti Sonith, S.Km.
: Yuspani

4. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

Ketua : Akram, S.Sos.,M.Si.
Anggota : Alhadam
: Reni Nurdiana, S.Pd.
: Fihri Syamsu
: Mieske

5. Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan

Ketua : Modalta Tarigan, SH.
Anggota : Arsam
: Chandra Kirana
: Amir Abd. Kadir
: Andri, SH.

6. Bidang *Sport Scense* dan IPTEK

Ketua : Muh. Djufri, S.Pd.,M.Pd.
Anggota : Muhammad Husni Pettawali
: Dwi Rahmat Hidayat
: Agri Sentanu
: Sarfan, S.Fil.I.

7. Bidang Pendidikan dan Penataran

Ketua : H. Nanang, SP.,M.AP.
Anggota : Djawaludin, S.Km.,M.Kes.
: Ita Puspita, SH.
: Ricky, S.Sos.
: Muliainingsih, S.Si.



Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah

8. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat

Ketua : Gunawan, S.STp., M.Si.
Anggota : Yulius Effrain, M.Par.,M.M ITM.
: Issrin Assagaf
: Muh. Nur Kholiq
: Irwan Yani, S.A.P.
: Virga Miranti

9. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Ketua : Mansur M.Nur, S.Sos.
Anggota : Wahyu SBR Pakaya, ST.
: Lita Endah Sari
: Dini Fitriani Pettalolo, SE.
: Arini Yudia Magfira, SE.

10. Bidang Auditor Internal

Ketua : Suradji, SE., MM.
Anggota : Muh. Rizal, SE.
: Hayati Badre
: Andri Dg. Pawara

KONI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA UMUM,



M. NIZAR RAHMATU, S.Sos.,M.Si.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga

Pemerintah Daerah Kota Palu adalah lembaga yang berhubungan atau menangani masalah keolahragaan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu dan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Palu, adalah lembaga yang dimaksud untuk membuat dan melaksanakan kebijakan keolahragaan.

DPRD Kota Palu merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam penentuan kebijakan di Daerah Kota Palu, salah satu lembaga yang mengatur segala bentuk kebijakan olahraga yang dibuat di Kota Palu adalah lembaga DPRD Mitra Komisi A, yang berfungsi membantu dan membuat kebijakan tentang kepemudaan dan olahraga. KONI Kota Palu adalah lembaga atau organisasi olahraga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan membina prestasi olahraga di Kota Palu. Sebagai induk dari pengurus cabang olahraga, KONI Kota Palu bertanggung jawab untuk mengembangkan prestasi olahraga yang ada di Kota Palu dan menyiapkan atlet untuk berkompetisi.

Olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Akan tetapi, KONI mempunyai misi untuk meningkatkan olahraga, misi tersebut antara lain:⁴⁷

1. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman
2. Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda.
3. Membentuk generasi muda yang memiliki kemadirian dengan rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan.

⁴⁷ KONI Kota Palu, <https://konisulteng.or.id/nizar-rahmatu-koni-kota-palu-lokomotif-olahraga-provinsi-sulteng/>. (29 Agustus 2024).

4. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan sistem pembinaan pembangunan keolahragaan dan sistem manajemen keolahragaan.
6. Meningkatkan mitra antara pemerintah dan masyarakat guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
7. Meningkatkan dan memberdayakan organisasi olahraga.

Kebijakan publik harus didasarkan pada landasan undang-undang yang kuat. Pemerintah Daerah Kota Palu menerapkan kebijakan keolahragaan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan nasional keolahragaan dan standar nasional keolahragaan.⁴⁸ Salah satu undang-undang utama yang mengatur keolahragaan di Kota Palu adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Dalam pasal 20 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah. Selain itu, pasal 21 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam peningkatan keolahragaan.⁴⁹

⁴⁸ Mahatma Chryshna, “*tentang Peraturan Pemerintah (PP) Penyelenggaraan Keolahragaan No. 16 Tahun 2007*”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/peraturan-pemerintah-tentang-penyelenggaraan-keolahragaan>. (14 September 2023).

⁴⁹ UUD RI, “*tentang Peningkatan prestasi atlet Indonesia diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional*”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/3tahun2005uupenj.htm>. (16 September 2023).

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan berkewajiban memberikan pelayanan serta kemudahan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan beberapa poin terkait bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi olahraga, meliputi:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 20:⁵⁰

1. Kebijakan untuk melakukan pengembangan perkumpulan olahraga, seperti organisasi atau klub olahraga.
2. Kebijakan pembuatan pusat olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi keolahragaan.
3. Kebijakan dalam pembinaan prestasi olahraga.
4. Kebijakan terhadap pelatihan atau pendidikan atlet.
5. Kebijakan untuk membangun sarana dan prasarana dalam rangka menunjang prestasi atlet.
6. Kebijakan pembuatan sistem keolahragaan dan pengembangan bakat atlet.
7. Kebijakan pendirian sistem informasi keolahragaan tentang peningkatan prestasi atlet nasional.
8. Kebijakan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk membangun satu cabang olahraga dengan standar internasional.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan :

⁵⁰ Ibid

1. Kebijakan keolahragaan untuk mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan keolahragaan di daerah.
2. Kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.
3. Kebijakan terhadap desain besar olahraga nasional di daerah dengan menerapkan desain olahraga daerah.

Selain itu, pengelolaan olahraga di provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu Komite Olahraga Nasional di provinsi yang dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga di Provinsi. Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan, menjelaskan tugas dan wewenang KONI di provinsi terhadap peningkatan prestasi olahraga.⁵¹

Komite Olahraga Nasional di provinsi mempunyai tugas, antara lain :

1. Melakukan tugas koordinasi dengan organisasi cabang olahraga di tingkat provinsi, serta KONI di kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga.
2. Membantu Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pekan olahraga provinsi.
3. Membantu organisasi cabang olahraga dalam pengembangan dan menggalian bibit olahragawan di provinsi.
4. Membantu organisasi cabang olahraga di provinsi dalam pemassalan cabang olahraga potensial.

⁵¹ BPK RI, “tentang Keolahragaan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2022”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>. (20 Juni 2024).

Komite Olahraga Nasional di provinsi atau kabupaten/kota mempunyai wewenang, antara lain :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah provinsi dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga.
2. Mengoordinasi induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional di provinsi atau kabupaten/kota.
3. Menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang prestasi olahraga dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah.

Untuk membuat penerapan kebijakan menjadi jelas dan efektif, kebijakan harus memiliki garis besar yang jelas. Garis besar ini juga membantu dalam proses pembuatan kebijakan. Strategi dan persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) atau pekan olahraga lainnya tidak sama untuk setiap kota. Kesuksesan dalam mencapai target atau gelar juara bergantung pada seberapa baik persiapan dan persiapan strategi dilakukan. Secara tidak langsung, prestasi yang dicapai menunjukkan tingkat kerja keras dan kualitas atlet yang terlibat. Atlet dan manajemen setiap cabang olahraga menerima perlakuan yang berbeda-beda. Pada tahun 2023, ada 27 cabang olahraga yang dinaungi oleh KONI Kota Palu, dan terdapat 76 atlet dari Kota Palu.⁵²

⁵² KONI Kota Palu, "Dokumen nama-nama Atlet". (19 Juni).

Gambar 4.
Jumlah atlet di kota palu⁵³

KONI KOTA PALU

Jumlah Olahragawan Kota Palu, 2023
The Number of Sportmans in Palu Municipality

Cabang Olahraga	Jenis Kelamin / Gender		Jumlah
	Putra /Male	Putri / Fabela	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Anggar / Hangar	-	-	-
2. Atletik / Athletics	22	15	37
3. Bilyard	25	5	30
4. Bola Basket / Basketball	240	120	360
5. Bola Volly / Volley Ball	16	14	30
6. Bridge	22	6	28
7. Bulu Tangkis / Badminton	20	10	30
8. Catur / Chess	7	1	8
9. Karate	30	26	56
10. Kempo	8	6	14
11. Pencak Silat / Martial Arts	15	14	29
12. Sepak Bola / Soccer	75	-	75
13. Sepak Takraw	40	10	50
14. Teakwondo	450	350	800
15. Tenis Lapangan	9	1	10
16. Tenis Meja / Table Tennis	8	4	12
17. Tinju / Boxing	28	22	50
18. Panjang Tebing / Rock Climbing	7	6	13
19. Dayung / Paddle	12	2	14
20. Renang / Swimming	13	11	24
21. Judo	20	10	30
22. Gateball	50	45	95
23. Balap Motor/ Motor Racing	4	-	4
24. Futsal	20	-	20
25. Panahan	50	50	100
26. Paralayang	10	5	15
28. Menembak	10	10	20
27. Binaraga Fitness	42	-	42

⁵³ Ibid

Gambar 5
Nama-nama Atlet PON Kota Palu⁵⁴

 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA PALU Jalan Balai Kota No. 3 Palu – Sulawesi Tengah Email : konikotapalu01@gmail.com				
DAFTAR NAMA – NAMA ATLET KOTA PALU				
KONTINGEN SULTENG PON XXI/2024 ACEH – SUMUT				
No.	No. Urut	NAMA	CABOR	STATUS
1.	20.	AKMAL FAUZAN	SEPAK TAKRAW	ATLET
2.	21.	MICHAEL JADERSON PARADA	SEPAK TAKRAW	ATLET
3.	35.	FIRMANSYAH	PETANGQUE	ATLET
4.	44.	ILHAM ELSAN EFENDI	BALAP MOTOR	ATLET
5.	45.	CARLOS DEMELOS. N	BALAP MOTOR	ATLET
6.	46.	MAEGA QAHHAR. S. PUTRA	BALAP MOTOR	ATLET
7.	47.	GIAN DWI SAPUTRA	BALAP MOTOR	ATLET
8.	48.	RYAN PRATAMA	BALAP MOTOR	ATLET
9.	55.	NUGRAH SETIAWAN	GRASSTRACK	ATLET
10.	56.	AHMAD FEBRIANTO	GRASSTRACK	ATLET
11.	67.	REYNO APRILIAN	GRASSTRACK	ATLET
12.	73.	I GEDE SIMAN SUDARTAWA	RENANG	ATLET
13.	74.	JOE ADITYA WIJAYA KURNIAWAN	RENANG	ATLET
14.	75.	MUHAMMAD FARHAN ANDI MAROEF	RENANG	ATLET
15.	76.	JEREMY ELTON MASTER GENESHA DAMANIK	RENANG	ATLET
16.	77.	ALEXANDER ADRIAN	RENANG	ATLET
17.	78.	AZZAHRA PERMATAHANI	RENANG	ATLET
18.	79.	SOFIE KEMALA FATIHA	RENANG	ATLET
19.	105.	MOHAMMAD ARDI	GATEBALL	ATLET
20.	106.	ARINI YUDIA MAGFIRAH	GATEBALL	ATLET
21.	107.	SURYA RAMADHAN LAHINTA	GATEBALL	ATLET
22.	108.	SUMIATI	GATEBALL	ATLET
23.	109.	MUH. ZAHID RPSQ PAKAYA	GATEBALL	ATLET
24.	110.	FADLI DG SALASA	PARALAYANG	ATLET
25.	143.	DEITA SRI LINTANG	BOLA VOLI	ATLET
26.	144.	RIRIN ANANDA RAUF	BOLA VOLI	ATLET
27.	145.	GINA ANGGRIANA PUTRI MULIANTO	BOLA VOLI	ATLET
28.	146.	INDRI FRISCA CALUDIA	BOLA VOLI	ATLET
29.	147.	MEILANI PUTRI LANGIMPU	BOLA VOLI	ATLET
30.	148.	ELIN	BOLA VOLI	ATLET
31.	166.	ALICIA AUREL MARIA HOO	MENEMBAK	ATLET
32.	167.	JOSHUA BRILLIANT	MENEMBAK	ATLET
33.	175.	ARYA WIRARAJA	PANJAT TEBING	ATLET
34.	176.	IVAN ALANA	PANJAT TEBING	ATLET
35.	181.	FATYA SYIFA RAMADHANI	PANJAT TEBING	ATLET
36.	187.	VIONNISA ANDRIO	BALAP SEPEDA	ATLET

⁵⁴ Ibid

Gambar 6
Nama-nama Atlet PON Kota Palu⁵⁵

 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA PALU 				
Jalan Balai Kota No. 3 Palu – Sulawesi Tengah Email : konikotapalu01@gmail.com				
37.	188.	MUH. MAHATIR PUTRA JAYA	BALAP SEPEDA	ATLET
38.	192.	ULIL AMRI	BOLA BASKET	ATLET
39.	193.	IQBAL HAFIDZ IDRIS	BOLA BASKET	ATLET
40.	194.	JENSEN GERALDINO THENSY	BOLA BASKET	ATLET
41.	200.	ABDUL AZIZ TRI IRZA SAPUTRA	TRIATHON	ATLET
42.	204.	DAHLIA	JUDO	ATLET
43.	209.	PUTRA RISKY ANUGRAH	KARATE	ATLET
44.	210.	RAHMAT R. GANI	KARATE	ATLET
45.	211.	RAHMA DEA MARSHANDA D.A	KARATE	ATLET
46.	212.	TRI FAHRIYANTIRAMADHANA I	KARATE	ATLET
47.	213.	REYVA IMELDA SAMBENTHIRO	KARATE	ATLET
48.	215.	REXY	SEPAK BOLA	ATLET
49.	216.	MOH. YUDHA	SEPAK BOLA	ATLET
50.	217.	DAMAR	SEPAK BOLA	ATLET
51.	222.	ICHWANSYA	SEPAK BOLA	ATLET
52.	227.	MUH. AZAK	SEPAK BOLA	ATLET
53.	229.	WAHYU ALMAN PORU	SEPAK BOLA	ATLET
54.	230.	MUHAMMAD ADRIAN	SEPAK BOLA	ATLET
55.	231.	ARYO MAHENDRA	SEPAK BOLA	ATLET
56.	232.	JEMRIS	SEPAK BOLA	ATLET
57.	233.	MOH. AWAL RAHMADAN	SEPAK BOLA	ATLET
58.	239.	IDIL	SEPAK BOLA	ATLET
59.	240.	MOH. FAUZAN	SEPAK BOLA	ATLET
60.	241.	MOHAMAD RIFKI A	SEPAK BOLA	ATLET
61.	257.	ASUHAN PATTIHA	DAYUNG	ATLET
62.	258.	AHMAD TARMIZI. N	DAYUNG	ATLET
63.	263.	JUAN FELIX SUELO	DAYUNG	ATLET
64.	265.	MOH. SAFWAN	DAYUNG	ATLET
65.	266.	ADHITA PUTRI MEIVY	DAYUNG	ATLET
66.	267.	GAVRA GAVREIELA. A	DAYUNG	ATLET
67.	281.	JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG	DAYUNG	ATLET
68.	282.	ADJAT ABDUROOJAK IR	BRIDGE	ATLET
69.	283.	KUSUMANTO SIGIT	BRIDGE	ATLET
70.	284.	HUIBERT G. PUSUNG	BRIDGE	ATLET
71.	285.	JEMMY TUGIMAN	BRIDGE	ATLET
72.	286.	NOVRY KALIGIS	BRIDGE	ATLET
73.	298.	MUH. SADAM	SEPATU RODA	ATLET
74.	299.	MAHARANI	SEPATU RODA	ATLET
75.	309.	MUHAMMAD HAIKAL ADAM	PANAHAN	ATLET
76.	325.	MUHAMMAT RIZAL	TAEKWONDO	ATLET

⁵⁵ Ibid

Berdasarkan visi dan strategi pemerintah Kota Palu, KONI dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut dalam pengembangan visi dan strategi politik untuk peningkatan prestasi olahraga di Kota Palu dan prestasi di tingkat lokal, nasional, dan daerah.:

1. Penyelenggaraan Olahraga pendidikan dan Olahraga Prestasi,
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
3. Pengelolaan Keolahragaan.
4. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan.
5. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga.
6. Pencegahan dan Pengawasan Terhadap Doping.
7. Pemberian Penghargaan Keolahragaan.

Semua rencana, keputusan, dan tindakan yang dilakukan KONI Kota Palu dan semua bagian organisasinya terlibat dalam strategi ini untuk mencapai visi dan misi. Studi dilakukan pada cabang olahraga karate KONI Kota Palu untuk memahami secara khusus bagaimana strategi tersebut diterapkan. Cabang olahraga ini memiliki banyak prestasi. Pada kejuaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021, Yuningsi Cristiana Masoara atlet cabang olahraga karate Kota Palu mendapatkan melodi perunggu. Serta pada tahun 2024, atlet cabang olahraga Kota Palu Reyva Imelda Sambentihiro meraih pedali perunggu dan mampu mencatatkan prestasi di acara bertaraf internasional, yaitu kejuaraan *South East Asia Karate Federation (SEAKF)* di Bangkok, Thailand.⁵⁶

⁵⁶ Wadokai Sulawesi Tengah. "https://www.instagram.com/wadokai_sulawesitengah". (01 Juli 2024).

Karate merupakan seni bela diri yang berasal dari Jepang. Karate terdiri dari dua kata kanji, 'kara' yang berarti 'kosong' dan 'te' yang berarti 'tangan'. Kedua kanji tersebut berarti "tangan kosong". Karate adalah seni bela diri yang memungkinkan seseorang membela diri tanpa senjata. Ini adalah olahraga pertarungan yang sangat populer di seluruh dunia dan sangat dicari oleh orang-orang dari segala usia untuk melindungi kesehatan fisik mereka dan mencegah serangan teroris yang berbeda. Cabang olahraga karate dalam pertandingan diklasifikasikan minat dan berdasarkan berat badan. Antara lain untuk putra (pemula, kadet, junior dan senior) terdiri dari kelas kata perorangan, kata beregu, kumite -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg, kumite kelas bebas, kumite beregu. Sedangkan untuk putri (pemula, kadet, junior dan senior) terdiri dari kata perorangan, kata beregu, kumite -48kg, -53kg, -60kg, +60kg, -68kg, +68kg, kumite kelas bebas, kumite beregu.⁵⁷

Studi dilakukan di cabang olahraga karate sebagai salah satu cabang olahraga yang tergabung dalam atlet yang membawa nama Kota Palu pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumut. Studi dilakukan pada cabang olahraga karate untuk mendapatkan hasil yang lebih dalam mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Palu. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi dilakukan melalui program KONI Kota Palu. KONI Kota Palu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi atlet.

⁵⁷ Proposal Karate Open Turnamen. "Kategori Kelas Open Turnamen". (29 Agustus 2024).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi atlet antara lain:

1. Faktor Atlet

Proses tes dan seleksi atlet dilakukan secara terbuka dan objektif, dan KONI Kota Palu menentukan hasilnya. Atlet dipilih berdasarkan data fisik, teknik, taktik, psikologis, dan prestasi mereka. Tetap ada aturan dan persyaratan yang jelas bagi mereka yang ingin menjadi atlet di Kota Palu. KONI Kota Palu memiliki kendali sepenuhnya dalam menentukan atlet yang lolos sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan. Cabang karate memiliki lima atlet kumite individu, terdiri dari dua pria dan tiga wanita. Walaupun kualitas atlet mungkin tidak ideal, cabang olahraga karate memiliki atlet yang bagus. Atlet semuanya pernah berprestasi di tingkat nasional.

2. Faktor Pelatih

Seperti halnya atlet, pengajuan calon pelatih diajukan oleh pengurus provinsi cabang olahraga namun juga bisa dilakukan dengan mendaftarkan secara perorangan. Proses pilihan pelatih pada prinsipnya bersifat sentralistik dan sepenuhnya di tangani oleh KONI Kota Palu. Kemudian, calon pelatih diseleksi oleh bagian pembinaan dan prestasi yang dilakukan melalui uji kelayakan. Begitu juga pada cabang olahraga karate, pelatih harus melalui serangkaian uji kelayakan dan memenuhi kriteria yang diberikan oleh KONI Kota Palu. Pelatih karate sendiri harus memiliki lisensi pelatih dan memiliki pengalaman menjadi atlet karate Kota Palu berprestasi.

3. Faktor Organisasi

KONI Kota Palu sebagai organisasi olahraga pelaksana melakukan upaya sebagai serangkaian kebijakan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Beberapa upaya yang dilakukan oleh KONI Kota Palu antara lain melakukan pengawasan. KONI Kota Palu tetap melakukan kontrol dan pengawasan melalui beberapa serangkaian tes dan memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan olahraga.

4. Faktor Tempat/Perlengkapan/keuangan

KONI Kota Palu berupaya memenuhi kebutuhan secara efisien dan efektif. Cabang olahraga mengusulkan tempat latihan kepada KONI Kota Palu setelah mempertimbangkan berbagai hal. Seperti halnya asrama, gym, dan lapangan atletik, fasilitasnya memadai. Meskipun ada tempat latihan yang berkualitas, cabang karate tidak memiliki tempat sendiri untuk berlatih. Sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga, KONI Kota Palu bertanggung jawab secara penuh untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. KONI Kota Palu bekerja sama dengan DISPORA untuk memberikan dana pembinaan dan hibah kepada 27 cabang olahraga di Kota Palu untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Ir. Calvin Tawil

(Sekertaris Umum KONI Kota Palu).

..KONI Kota Palu bekerja sama dengan DISPORA Kota Palu dengan memberikan dana pembinaan dan dana hibah, kepada atlet-atlet Kota Palu, akan tetapi kekurangannya belum bisa memberikan dana seperti yang dibutuhkan oleh cabang olahraga yang ada di palu.⁵⁸

⁵⁸ Sekertaris Umum KONI Kota Palu, "wawancara". (30 Mei 2024).

5. Faktor Partisipasi Pemerintah

Dalam melaksanakan program kerja dan kegiatannya, KONI Kota Palu mempertimbangkan sumber daya dan kebutuhan sarana dan prasarana. Sebagian dari dana yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Palu digunakan oleh KONI Kota Palu untuk berbagai kegiatan. Oleh karena itu, KONI Kota Palu harus terus menggunakan dana tersebut secara efisien dan efektif. Pelatih cabang olahraga dapat mengajukan surat kepada Ketua Umum KONI Kota Palu untuk setiap pertandingan yang telah ditetapkan. KONI Kota Palu memberikan dukungan dalam berbagai hal, seperti seragam, transportasi, akomodasi, dan konsumsi, serta biaya pendaftaran. Pendanaan diperlukan selama latihan dan partisipasi dalam pertandingan, yang akan dipenuhi dengan sebaik mungkin oleh KONI Kota Palu.

Tahapan pengembangan kebijakan dan manajemen di Kota Palu adalah untuk mengembangkan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan yang memajukan olahraga, memperkuat kelembagaan olahraga lokal dan nasional, meningkatkan jumlah dan kualitas pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga, meningkatkan efisiensi dan kualitas pembiayaan olahraga di Kota Palu. Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan analisis dan penelitian tentang pengelolaan prestasi karate daerah dan nasional. Tahapan dan program utamanya mencakup hal-hal berikut:

1. Pengelolaan Peningkatan Mutu SDM Tenaga Keolahragaan Kota Palu.
2. Sosialisasi Standar Keolahragaan Cabang Olahraga Karate.
3. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Karate.

4. Penataran Wasit Cabang Olahraga Karate.

5. Workshop Tata Kelola Organisasi.

Tujuan pembinaan dari Pemerintah Kota Palu, DISPORA dan KONI Kota Palu dalam permasyarakatan olahraga dari Pemerintah Kota Palu, DISPORA dan KONI Kota Palu bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan mental dan spiritual masyarakat dan siswa mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk melatih kemampuan dan menunjang prestasi olahraga di berbagai ajang lokal, nasional, dan internasional.

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Irsan Setria, SH (Ketua Umum Komisi A DPRD Kota Palu).

..Tahapan-tahapannya akan dimasukkan pada pembahasan peningkatan prestasi olahraga di DPRD Provinsi yang bekerja sama dengan DPRD Kota untuk mendorong, mengsucceskan, meningkatkan prestasi-prestasi olahraga yang ada di Kota palu.⁵⁹

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kota Palu.

Dalam menerapkan berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga Kota Palu, tentunya tidak bisa dilepaskan dari konflik dan ketidakseimbangan dari berbagai dinamika yang ada.

⁵⁹ Ketua Umum Komisi A DPRD Kota Palu, "wawancara", (13 Mei 2024).

A. Faktor Pendukung dalam Implementasikan Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kota Palu

Potensi Kota Palu meliputi kerjasama antara lembaga keolahragaan dan konstitusi merupakan bentuk pendorong kebijakan pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraganya.

1. Faktor Pembinaan Potensi Daerah

Pembinaan merupakan bagian penting dari olahraga, pembinaan bermutu diperlukan untuk mengembangkan atlet di usia dini, junior, senior, dan elit. Potensi daerah yang dimaksud adalah jumlah penduduk Indonesia yang ditandai dengan usia muda yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia tua. Secara bakat dan fisik, usia muda memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Usia muda ini akan melanjutkan potensi generasi sebelumnya yang sudah berusia tua maupun yang sudah pensiun.

Program pelatihan atlet di Kota Palu memiliki kualitas yang cukup dan diawasi secara ketat. Program ini dilakukan secara bertahap dan tidak terputus, dan didukung oleh program kejuaraan yang cukup rutin. Pengalaman bermain di kejuaraan ini membantu para atlet memperkuat mental mereka saat bertanding. Mental para atlet sangat penting untuk prestasi, teknik, dan taktik mereka dalam bertanding. Pembinaan dimulai dengan pemilihan atlet yang memiliki peluang untuk menang. Kemudian, untuk menjaga keseimbangan kondisi para atlet, pembinaan dilakukan secara bertahap dalam waktu yang cukup untuk mempertahankan keseimbangan prestasi.

2. Penyelenggaraan Olahraga

Pemerintah Daerah Kota Palu mengadakan kompetisi olahraga. Atlet dari cabang olahraga karate yang dibina dikirim ke kejuaraan resmi yang diatur oleh pengurus pusat, pengurus besar, atau kejuaraan umum, jika diperlukan. Penyelenggaraan ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencari pengalaman atlet karate yang dibina. Pemerintah Daerah Kota Palu mengadakan kejuaraan Pekan Olahraga Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Provinsi (POPProv), Kejuaraan Daerah (KEJURDA), kejuaraan-kejuaraan ini dipusatkan untuk olahraga pendidikan yang diikuti oleh pelajar.

Kejuaraan digunakan sebagai sarana untuk memilih atlet untuk berpartisipasi dan kemudian dikirim untuk mengikuti uji coba sebagai bagian dari persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Penyelenggaraan kejuaraan ini sangat baik karena memberi atlet kesempatan untuk berkompetisi dan mendapatkan pengalaman untuk mempersiapkan diri mereka untuk kejuaraan yang ditargetkan.

3. Sarana dan Prasarana yang Sedang ditingkatkan dan Berangsur Membaik

Pemerintah Kota Palu memiliki gedung dan lapangan yang sebagian nasional, baik yang sudah berdiri maupun yang masih dalam proses pembangunan, seperti Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu dan lapangan Faqih Rasyid. Dengan sarana dan prasarana ini, KONI Kota Palu dapat menyelenggarakan kejuaraan dan atlet juga memiliki tempat untuk berlatih.

4. Perhatian Pemerintah Kota Palu terhadap Olahraga Berangsur Membaik

Pemerintah melalui KONI Kota Palu sedang meningkatkan perhatian kepada atlet yang berprestasi dalam olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Atlet yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional mewakili Daerah Kota Palu akan menerima penghargaan berupa uang pembinaan dan sertifikat piagam, yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai mereka saat mendaftar di tingkat berikutnya. Penghargaan yang diberikan kepada atlet yang mengikuti dan menjuarai kejuaraan besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) akan diberikan berupa bonus serta mendapatkan janji diberikan rumah oleh Pemerintah Kota Palu..

Perhatian KONI Kota Palu kepada atlet cabang olahraga karate maupun cabang olahraga lainnya sedang ditingkatkan dan berangsur membaik dengan adanya jaminan yang diberikan membuat atlet lebih semangat dalam berlatih untuk prestasi agar target yang dituju akan dapat tercapai.

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Ir. Calvin Tawil

(Sekertaris Umum KONI Kota Palu).

..Dalam menghadapi PON 2021 Aceh-Sumut, KONI diberikan kemudahan untuk mendampingi atlet-atlet PON, dengan harapan pendamping memberikan penilaian kepada atlet sesuai prestasi yang dimiliki, lalu dilaporkan kepada Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Kota Palu yang akan memberikan apresiasi berupa bonus dan lain-lain melalui KONI Kota Palu.⁶⁰

B. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kota Palu.

Dalam mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan di Kota Palu tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan pasang surut yang ada. Begitupun dengan

⁶⁰Sekretaris Umum KONI Kota Palu, "wawancara". (30 Mei 2024).

faktor penghambat pastinya mengiringi proses implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota palu. kendala yang paling besar dalam meningkatkan prestasi di Kota Palu adalah ketergantungan pada dana.

Olahraga didanai oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pengalokasian dana olahraga tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seperti dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pembinaan dalam meningkatkan prestasi olahraga adalah kegiatan yang memerlukan biaya banyak, pembangunan sarana dan prasarana olahraga berstandar biaya besar, para pengurus daerah cabang olahraga juga memerlukan banyak biaya. Oleh karena dana dari APBD yang berupa dana oprasional dan dana bantuan (dana hibah) yang diberikan kepada pengurus olahraga daerah diberikan sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Palu bukan berdasar dari pengurus olahraga daerah. Ketergantungan terhadap dana ini sangat terlihat pada pembangunan sarana dan prasana yang masih terkendala dalam

proses penyediaan dan pembangunannya untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu.

Berdasarkan pembahasan penerapan kebijakan keolahragaan KONI Kota Palu, sedang ditingkatkan. Program pembinaan yang dilakukan sedang dalam proses peningkatan, mulai dari usia dini maupun penyelenggaraan kejuaraan sebagai tempat atlet juga sudah lumayan sering di adakan oleh pemerintah. Selain itu proses peningkatan sarana dan prasarana sedang dijalankan oleh pemerintah. Akan tetapi proses yang sedang dijalankan pemerintah Kota Palu sedikit lebih lambat, karena adanya kendala masalah dana yang bisa dibilang kurang memadai.

Selain pendanaan, sarana dan prasarana adalah kendala yang cukup besar yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palu, atlet tanpa sarana dan prasarana tidak dapat menghasilkan apa-apa. Pentingnya sarana dan prasarana olahraga diungkap oleh atlet PON XX Papua 2021 dan pendamping atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024 cabang olahraga karate, masih sangat kurangnya fasilitas untuk para atlet dapat diliat dari cabang olahraga karate yang menumpang kepada fasilitas yang dimiliki oleh pihak swasta.

Berikut wawancara peneliti dengan Fania Dwi Maharani SE., M.PWP (atlet PON XX Papua 2021 dan pendamping atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024 cabang olahraga karate).

.. *Kurangnya pembinaan, sarana dan prasarana dari dari Kota maupun Provinsi Kota Palu.*⁶¹

Pemerintah Kota Palu berkewajiban untuk menangani masalah pembangunan di Kota Palu termasuk pembangunan keolahragaan yang ada di

⁶¹Atlet PON XX Papua 2021 dan pendamping atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024 cabang olahraga karate, "wawancara" (12 Juni 2024).

Kota Palu. oleh karena itu Pemerintah Kota Palu sedang berusaha untuk menangani masalah terkait dana untuk proses pembangunan mulai dari pembinaan, sarana dan prasarana melalui DISPORA Kota Palu Dan KONI Kota Palu, agar atlet menjadi lebih fokus dalam meraih prestasi.

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Irsan Satria, SH (Ketua

Umum Komisi A DPRD Kota Palu)

.. DPRD Kota Palu Sedang berusaha menangani dan mengawasi prihal masalah pembangunan termasuk pembangunan keolahragaan yang ada di Kota Palu dan DPRD Kota Palu selalu mendorong keolahragaan yang ada di Kota Palu.⁶²

⁶²Ketua Umum Komisi A DPRD Kota Palu, “wawancara”, (13 Mei 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Suatu daerah harus memberikan perhatian khusus kepada sistem keolahragaan. Peningkatan prestasi atlet di Kota Palu berkaitan kuat dengan harga diri, martabat dan kebanggaan daerah. Pemerintah Kota Palu masih berusaha menjalani prinsip-prinsip kebijakan publik dengan mengevaluasi dan memperbaiki keolahragaan yang ada di Kota Palu. Walaupun tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, olahraga di Kota Palu berangsur membaik, hal ini dibuktikan dengan pembinaan, pengembangan olahraga yang sedang dalam pembangunan serta sarana dan prasarana yang sedang diusahakan agar lebih memdai oleh KONI Kota Palu.

Untuk meningkatkan prestasi olahraga di berbagai daerah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa bentuk kebijakan antara lain :

- Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Menyatakan bahwa : pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan keolahragaan meliputi pengorganisasian, pendanaan, metode keolahragaan serta penghargaan keolahragaan.
- Undang-undang No 3 Tahun 2005 pasal 12 ayat 2.
Menyatakan bahwa: pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, mekoordinasikan pembinaan dan pengembangan

keolahragaan dan melakukan standarisasi keolahragaan di masing-masing daerah.

- Undang-undang No 3 Tahun 2005 pasal 13 ayat 2.

Menyatakan bahwa : pemerintah daerah memiliki wewenang dalam peningkatan keolahragaan.

- Undang-undang No 11 Tahun 2022 pasal 40 tentang Keolahragaan.

Menyatakan bahwa : menegaskan dan menjelaskan tugas dan wewenang KONI di setiap provinsi teradap peningkatan prestasi olahraga.

KONI Kota Palu memiliki atlet dan pelatih yang kompeten, hal ini berdasarkan kriteria dan hasil seleksi yang dilakukan KONI Kota Palu secara umum, namun jumlah yang ada saat ini masih belum maksimal dilihat dari jumlah atlet pada cabang olahraga karate yang cuman mengisi sebagian dari jumlah kelas yang tersedia. Namun dari seluruh atlet karate yang ada di Kota Palu, sudah di seleksi dan memiliki prestasi dan kualitas yang sangat baik. Karena KONI Kota Palu memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan prestasi atlet, antara lain yaitu :

- Faktor Atlet
- Faktor Pelatih
- Faktor Organisasi
- Faktor Tempat/Perlengkapan/Keuangan
- Faktor Partisipasi Pemerintah

Dalam implementasi kebijakan peningkatan prestasi di Kota Palu memiliki faktor-faktor pendukung dan penghambat.

1. Faktor-faktor pendukung berupa : faktor pembinaan potensi, penyelenggaraan olahraga, sarana dan prasarana yang sedang di tingkatkan dan berangsur membaik, perhatian KONI Kota Palu terhadap prestasi berangsur membaik.

2. Faktor penghambat dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu yang sangat besar adalah dana. Dana adalah hambatan yang paling besar dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Palu, seperti sarana dan prasarana yang masih banyak belum memadai, proses pembangunan yang lama. Karena tanpa adanya sarana dan prasarana atlet tidak dapat menghasilkan apa-apa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran diajukan oleh peneliti :

1. Bagi Pemerintah Kota Palu, khususnya KONI Kota Palu hendaknya merumuskan dan merencanakan untuk mengembangkan olahraga sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan di Kota Palu agar olahraga mendapat dukungan penuh dan menjadi prioritas.

2. Berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut harus disikapi oleh pemerintah Kota Palu secara serius dan bijaksana sebagai langkah meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu.

3. Diharapkan Pemerintah Kota Palu dan KONI Kota Palu agar lebih memperhatikan kendala dalam pembangunan terutama masalah dana yang

termasuk pokok penting dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangan para atlet di Kota Palu

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, Iksan. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing", Loan Pada PT. Bank Mandiri Tbk." Skripsi, Manajemen, Universitas Hasanudin, Makassar: 2012.
- Anggara, Dr. Sahya, M.Si. "Sistem politik Indonesia". Bandung: 2013.
- Atlet PON XX Papua 2021 dan pendamping atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024 cabang olahraga karate, "wawancara", (12 Juni 2024).
- Bungin, Burhan. "Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosal Lainnya" cet. 3; Jakarta: Kencana, 2009.
- BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, "Sejarah Kota Palu".
[https://bpmpsulteng.kemdi ud.go.id/sejarah-kota-palu/](https://bpmpsulteng.kemdi.ud.go.id/sejarah-kota-palu/). (18 Juni 2024).
- BPK RI, "tentang Keolahragaan diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2022". <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>. (20 Juni 2024).
- Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewi, Dr.Dian suluh Kusuma,M.AP., "Kebijakan Publik;Proses, Imlementasi dan Evaluasi". Yogyakarta, 1, Juni 2022.
- Dolab, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, akses tanggal 09 September 2023.
- Dr. hermawan, S.e., M.Pd. "Olahraga, Rekreasi Dan Waktu Luang". Depok: 2020.
- Dr. Suharno, M. Si. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik". Yogyakarta: 2010.
- Fatma, Mambang. "Strategi Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Di Provinsi Kalimantan Tengah". Skripsi, Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah, 2016.
- Harahap, I. "Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Nasiona". Skripsi, Universitas bakrie: Program studi Ilmu Politik, 2018.
- Humas.fku, "tentang observasi atau observasi partisipasi dalam penelitian", <https://fkkmk.ugm.ac.id/observasi-atau-observasi-partisipasi-dalam-penelitian/>. (14 Februari 2023).

- Jatmoko, Aldian. Peran DISPORA Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Skripsi, Universitas Riau: Program studi Ilmu Administrasi Publik, 2017
- Kementrian Pemuda Dan Olahraga, “Peningkatan prestasi atlet Indonesia diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional”.
- Ketua Umum Komisi A DPRD Kota Palu, “wawancara”, (13 Mei 2024).
- Komite Olahraga Nasional Indonesia, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Komite Olahraga_Nasional_Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia). (20 Juni 2024).
- KONI Kota Palu, ”Dokumen nama-nama Atlet” .(19 Juni).
- Mahatma, Chryshna. “ tentang Peraturan Pemerintah (PP) Penyelenggaraan Keolahragaan No. 16 Tahun 2007”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/peraturan-pemerintah-tentang-penyelenggaraan-keolahragaan>. (14 September 2023).
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. “*Metodologi Penelitian*”, cet. IV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Nugroho, Riant. “*Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*”. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta: 2011.
- Permatasari ,Widyani. “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros”. Skripsi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Poerdarminta, W.J.S. . “Kamus Umum Bahasa Indonesia”. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Pryanka, Grymaldy. “Pemberdayaan Atlet Karate Untuk Meningkatkan Prestasi Oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Di Kota Palu Sulawesi Tengah, Skripsi, Program studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, 2022.
- Proposal Karate Open Turnamen. “Kategori Kelas Open Turnamen”. (29 Agustus 2024).
- Saliba, amil. “*Mu’jam al-falsafi*”. Mesir: Dar al-Fikr, 1978.

- Setiadi, J. dan Nugroho. *“Perilaku Konsumen”*. Edisi Revisi, Penerbit Prenada Media Grup. Jakarta: 2010.
- Sugiono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*, cet.6: Bandung: CVALFABET, 2009.
- BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, *“Sejarah Kota Palu”*, <https://bpmpsulteng.kemdikbud.go.id/sejarah-kota-palu/>. (18 Juni 2024).
- Sekretaris Umum KONI Kota Palu, *“wawancara”*. (30 Mei 2024).
- Sumaryanto. *“Aksiologi Olahraga Dalam Perspektif Pengembangan Karakter Bangsa”*. Yogyakarta: 2016.
- UUD RI. *“tentang Peningkatan prestasi atlet Indonesia diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional”*.
- Wahab A.S. *“Pengantar Analisis Kebijakan Negara”*. Rineka Cipta. Jakarta: 2011.
- Winarno Budi. *“Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus”*. Yogyakarta: 2012.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN; ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 712 /Un.24/F.III/PP.00.9/03/2024 Palu, 27 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Ketua KONI
Kota Palu
Di
Palu

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dinda Nuraisyah
NIM : 20.2.17.0001
Semester : VIII
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)
Alamat : Jl. Gelatik
No. Hp : 085241824947

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KOTA PALU (Studi Kasus Cabang Olahraga Karate)".

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.
2. Muthia, M.AP.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kantor KONI Kota Palu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. H. Salik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

Tembusan :
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : /Un.24/F.III/PP.00.9/03/2024 Palu, Maret 2023
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kota Palu
Di
Palu

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dinda Nuraisyah
NIM : 20.2.17.0001
Semester : VIII
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)
Alamat : Jl. Gelatik
No. Hp : 085241824947

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KOTA PALU (Studi Kasus Cabang Olahraga Karate)".

Dosen Pembimbing :
1. Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I.
2. Muthia, M.AP.

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kantor DPRD Kota Palu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan,

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP. 196406161997031002

Tembusan :
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
(KONI)
KOTA PALU**

Jalan Balai Kota No. 3 Palu Sulawesi Tengah
Email : konikotapalu01@gmail.com



Nomo : 004/KONI-KP/V/2024

Palu, 30 Mei 2024

Lampiran : -

Perihal : **Balasan Surat izin Penelitian**

Kepada Yth:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

Di

P a l u.

Salam Olahraga.

Dengan hormat.

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri DATOKARA Palu Nomor : 712/Un.24/F.III/PP.00.9/03/2024, tertanggal 27 Maret 2024. Perihal Izin Penelitian di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palu dengan metode Wawancara tentang KEBIJAKAN POLITIK DALA MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KOTA PALU.

Mahasiswi atas nama : Dinda Nuraisyah

N I M : 20.2.17.0001

Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Telah melaksanakan Penelitian serta Wawancara tentang Judul Skripsi seperti tersebut diatas.

Demikian surat balasan Izin Penelitian ini disampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KOTA PALU**

An. **KETUA UMUM**


Ir. CALVIN TAWIL
Sekretaris Umum

File : arsip



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JL. DR. MOH. HATTA NO. 14 TELP. (0451) 429159 FAX. 421184 POS 94112

Palu, 29 April 2024

Nomor : 00.9/161/UMUM & KEPEGAWAIAN
Sifat :
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Falkutas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
di-
Palu

Menindak Lanjuti surat dari Falkutas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan Nomor 712/Un.24/F.III/PP.00.9/03/2024 perihal Izin Penelitian, maka pada prinsipnya kami menerima permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**KEBIJAKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KOTA PALU (Studi Kasus Cabang Olahraga Karate)**". Berikut nama mahasiswa yang melakukan Izin Penelitian:

Nama : **Dinda Nuraisyah**
Stambuk : 20.2.17.0001
Program Studi : Pemikiran Politik Islam (PPI)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD KOTA PALU



MOH. RIDWAN KARIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19730819 199302 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Nama Informan / Narasumber	Jenis Pertanyaan
1.	Irsan Satria, SH (Ketua Komisi A, DPRD Kota Palu)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu? - Strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu? - Apakah sudah ada kebijakan pemerintah yang di terapkan kepada atlet Kota Palu?
2.	Ir. Calvin Tawil (Sekertaris Umum KONI Kota Palu)	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu? - Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu? - Strategi apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kota Palu? - Apakah sudah ada kebijakan pemerintah yang di terapkan kepada atlet Kota Palu?
3.	Fania Dwi Maharani SE., M.PWP (pendamping atlet karate PON Aceh-Sumut 2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk kebijakan pemerintah yang seperti apa yang diperlukan untuk para atlet? - Apa keluhan untuk pemerintah Kota Palu dari mantan atlet PON Papua 2021?
4.	Reyva Imelda Sambenthiro (atlet karate PON Aceh-Sumut 2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saran untuk pemerintah Kota Palu agar prestasi olahraga meningkat? - apa saja apresiasi Pemerintah Kota Palu untuk atlet PON?
5.	Putra Rezky Anugrah (atlet karate PON Aceh-Sumut 2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Apa saran untuk pemerintah Kota Palu agar prestasi olahraga meningkat? - apa saja apresiasi Pemerintah Kota Palu untuk atlet PON?

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang baik agar dapat melengkapi skripsi ini. Aspek yang diamati, antara lain :

1. Struktur Organisasi DPRD Kota Palu
2. Visi dan Misi DPRD Kota Palu
3. Susunan Personalia Pengurus KONI Kota Palu
4. Visi dan Misi KONI Kota Palu
5. Jumlah Atlet Olahraga di Kota Palu
6. Nama-nama Atlet PON 2024 Aceh-Sumut 2024

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto saat melakukan wawancara bersama Bapak Irsan Satria, SH
Ketua Umum Komisi A, DPRD Kota Palu



Foto saat selesai melakukan wawancara bersama Bapak Irsan Satria, SH
Ketua Umum Komisi A, DPRD Kota Palu



Foto saat selesai melakukan wawancara bersama Bapak Ir. Calvin Tawil Sekretaris Umum KONI Kota Palu.



Foto saat selesai melakukan wawancara bersama atlet karate KONI Kota Palu.



Foto saat selesai melakukan wawancara bersama pendamping atlet PON karate.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

Nama : Dinda Nuraisyah
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 25 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Nomor Induk Mahasiswa : 202170001
Alamat : Gelatik

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ibu : Helmi Sudin
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Toko Barang Plastik
Alamat : Gelatik
2. Nama Ayah : Yudhi Suwarsono
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Huntap Talise, Blok U

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Impres perumnas 2014
2. SMP Negeri 3 Palu 2017
3. SMK Bina Bakat Kartika Andi Masse Palu 2020
4. Melanjutkan Studi Pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri
Datokarama Palu S1 Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun 2020-sekarang

D. Riwayat Organisasi

1. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam
2022.

2. Bendahara Umum Senat mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
2023.